

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN *COMMUNITY BASED TOURISM*  
(STUDI KASUS DESA WISATA KETAPANRAME KABUPATEN MOJOKERTO JAWA TIMUR)**

**Tamianingsih**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[tamianingsih.18049@mhs.unesa.ac.id](mailto:tamianingsih.18049@mhs.unesa.ac.id)

**Deby Febriyan Eprilianto**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[debyepriyanto@unesa.ac.id](mailto:debyepriyanto@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Pembangunan nasional merupakan agenda yang wajib dilakukan hingga ranah desa dengan tujuan pemerataan kesejahteraan. Penerapan pembangunan menggunakan konsep desa wisata memerlukan adanya partisipasi masyarakat yang pengembangannya bisa dilakukan dengan *Community-Based Tourism* (CBT). Salah satu desa yang menerapkan konsep CBT adalah Desa Ketapanrame yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran partisipasi masyarakat yang tergabung dalam *community-based tourism* di Desa Wisata Ketapanrame. Subyek penelitian difokuskan kepada dua kelompok masyarakat yaitu KUB Taman Ghanjaran dan Pokdarwis Rakasiwi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini didasarkan pada indikator partisipasi menurut Theresia dalam Hajar (2018) yang terdiri dari: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dimana KUB Taman Ghanjaran memiliki kewenangan mengatur manajemen dan operasional secara mandiri sedangkan Pokdarwis Rakasiwi terbatas pada operasional; (2) partisipasi dalam pelaksana kegiatan, dimana masyarakat memberikan sumbangsih modal berupa saham dan kedua kelompok masyarakat memberikan sumbangsih tenaga dalam pengelolaan SDM, tempat wisata hingga media promosi; (3) partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, dimana kedua kelompok masyarakat rutin mengadakan rapat evaluasi dan pelaporan pendapatan; dan (4) partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dimana masyarakat yang terlibat merasa mendapat manfaat berupa lapangan pekerjaan dan dividen. Dalam pengelolaan wisata, Pokdarwis Rakasiwi masih memerlukan pendampingan karena sempat ada keluhan terkait parkir. Dari ketiga dusun, hanya Dusun Ketapanrame dan Dusun Sukorame yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan memiliki kelompok masyarakat pengelola. Oleh sebab itu diperlukan pelibatan kelompok masyarakat Dusun Slepi untuk menghindari kecemburuan sosial.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, *Community Based Tourism*, Desa Wisata Ketapanrame

**Abstract**

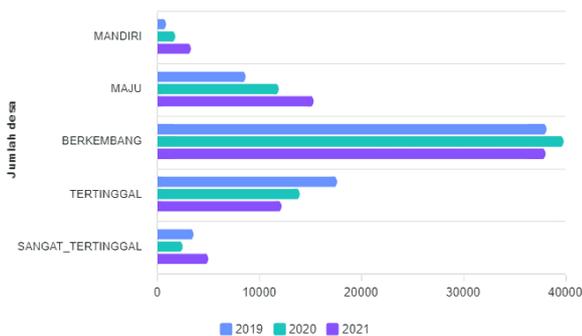
National development is an agenda that must be carried out to the village realm to distribute welfare. The application of development using the concept of a tourism village requires the participation of the community, whose development can be done with *Community-Based Tourism* (CBT). One of the villages that applies the CBT concept is Ketapanrame Village, located in Mojokerto Regency, East Java. Researchers used descriptive research methods with a qualitative approach and also case studies. This study aims to describe the role of community participants who are members of community-based tourism in the management of the Ketapanrame Tourism Village. This research focuses on two community groups: KUB Taman Ghanjaran, and Pokdarwis Rakasiwi. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation. The results of this study are based on participation indicators according to Theresia in Hajar (2018), which consist of: (1) participation in decision making, KUB Taman Ghanjaran has the authority to regulate management and operations independently, while Pokdarwis Rakasiwi is limited to operations only; (2) participation in implementing activities, the local society contributes business capital in the form of shares, and the communities contribute their energy to managing human resources, tourist attractions, and media promotions; (3) participation in monitoring and evaluation of development, the two community groups regularly hold evaluation meetings and report income; and (4) participation in the utilization of development results which the people involved feeling that they get to benefit from getting jobs and dividends. In tourism management, Pokdarwis Rakasiwi still needs accompaniment because there were complaints about parking. Of the three sub-villages, only Ketapanrame and Sukorame sub-villages are used as tourist attractions and have community groups. Therefore, it is necessary to involve the Slepi community group to avoid social jealousy.

**Keywords:** Community Participation, *Community Based Tourism*, Ketapanrame Tourism Village

**PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional merupakan agenda wajib yang harus dilakukan bangsa Indonesia dalam urusan keberlanjutan rumah tangga negara. Sebagai bangsa yang berbentuk kesatuan dan berasas keadilan, Indonesia dalam melaksanakan pembangunannya haruslah dilakukan secara merata hingga ke pelosok negeri termasuk ke ranah desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang meninggalkan suatu wilayah serta memiliki wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakat atau rumah tangganya sendiri (Prayitno, Gunawan, & Subagiyo, 2018). Selaras dengan pembangunan nasional, kehadiran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menggeser paradigma ‘membangun desa’ menjadi ‘desa membangun’. Desa yang dulunya dijadikan obyek pembangunan telah berganti menjadi subyek pembangunan. Tujuannya adalah menjadikan desa sebagai basis penghidupan masyarakat secara berkelanjutan serta mandiri (Kurniawan, 2015).

Dilansir dari status IDM (Indeks Desa Mandiri) Kementerian Desa per Desember 2021, status IDM di Indonesia terbagi dalam: (1) Desa Mandiri sebanyak 3.278 desa, (2) Desa Maju sebanyak 15.324 desa, (3) Desa Berkembang sebanyak 38.086 desa, (4) Desa Tertinggal sebanyak 12.177 desa, dan (5) Desa Sangat Tertinggal sebanyak 4.985 desa (Idm.kemendesa.go.id, 2021). Data ini menunjukkan masih terdapat lebih dari 15.000 desa yang memiliki masalah indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi yang masih rendah. Berikut adalah gambar grafik jumlah desa berdasarkan status IDM di Indonesia:

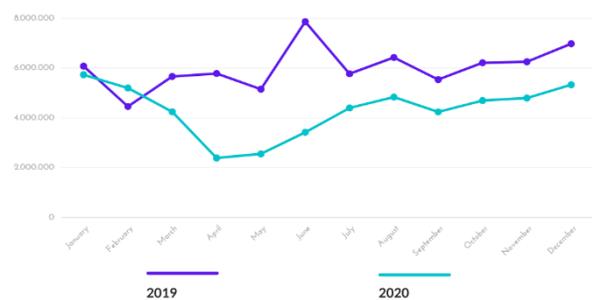


Gambar 1. Jumlah Desa dan Status IDM di Indonesia  
 Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/> (2021)

Pembangunan desa menuju desa mandiri memerlukan partisipasi aktif dari masyarakatnya. Partisipasi menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah serta potensi yang ada, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi permasalahan, pelaksanaan upaya mengatasi permasalahan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang telah

terjadi (Hajar et al., 2018). Selaras dengan definisi partisipasi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan merupakan aktualisasi dari kemauan, kesediaan, dan kepedulian masyarakat untuk berkorban serta berkontribusi terhadap implementasi program yang dilaksanakan (Adisasmita, 2018).

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 81 menyebutkan bahwa pembangunan desa melibatkan seluruh masyarakat desa dengan memanfaatkan kearifan lokal serta sumber daya alam desa. Salah satu cara pemanfaatan kearifan lokal desa bisa melalui pariwisata. Pariwisata menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Data jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia mengalami penurunan akibat adanya pandemi covid-19, yang mulanya 772,16 juta pada tahun 2019 menurun menjadi 518,59 juta pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021). Berikut grafik ilustrasi dari jumlah perjalanan wisatawan nusantara tahun 2019 – 2020:



Gambar 2. Jumlah Perjalanan Wisnus 2019-2020  
 Sumber: Statistik Wisatawan Nusantara 2020  
 Badan Pusat Statistik Indonesia (2021)

Pariwisata merupakan alternatif kegiatan ekonomi yang potensial untuk membangun suatu wilayah, oleh sebab itu pemulihan pariwisata di masa pandemi bisa dilakukan sejalan dengan pemulihan ekonomi.

Demi mendukung pembangunan yang memanfaatkan potensi kearifan lokal, lahir konsep desa wisata. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Prapita, 2018). Dilansir dari Jejaring Desa Wisata Kemenparekraf RI per April 2022, jumlah desa wisata di Indonesia mencapai 3.511 desa dengan persebaran 2.281 desa wisata rintisan, 942 desa wisata berkembang, 277 desa wisata maju dan 11 desa wisata mandiri (Jejaring Desa Wisata Kemenparekraf RI, 2022). Berikut adalah diagram perbandingan kategori desa wisata di Indonesia:



Gambar 3. Kategori Desa Wisata di Indonesia

Sumber: <https://jadesta.com/peta> (2022)

Tujuan desa wisata sendiri adalah meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama. Lebih lanjut pengembangannya tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat (Martini, 2020).

Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat memiliki kesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan yang sama-sama membutuhkan partisipasi masyarakat, hanya saja pendekatannya berbeda. Pariwisata berkelanjutan mengedepankan pendekatan *top-down* dimana inisiatifnya berasal dari pemerintah, sedangkan pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* (CBT) mengedepankan pendekatan *bottom-up* dimana inisiatif utamanya berasal dari masyarakat lokal (Purmada et al., 2016).

Adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dinilai bagian dari konsep pemberdayaan (Bhinadi, 2017). Dalam hal desa wisata, pariwisata desa berbasis kelompok masyarakat termasuk dalam pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menjaga kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan konsep CBT yang lahir atas kritik pembangunan pariwisata yang kurang memberikan keuntungan kepada kelompok lokal.

The ASEAN Secretariat (2016) mendefinisikan CBT sebagai kegiatan pariwisata yang dimiliki, dikelola, dan dikoordinir oleh masyarakat yang mana hasilnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat yang mendukung mata pencaharian berkelanjutan serta melindungi nilai sosial, budaya, dan sumber warisan alam. Dalam hal partisipasi, Amerta (2017) menyatakan bahwa CBT erat dengan dua perspektif partisipasi, yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam pembagian keuntungan pengembangan wisata. Martini (2020) juga menyebutkan bahwa CBT berdampak positif karena meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

CBT sendiri merupakan konsep yang bagus untuk dikembangkan, namun dalam pengimplementasiannya tidak selalu sempurna. Salah satu contoh penerapannya di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali, yang mana pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal masih belum

terwujud secara optimal karena peran pemerintah, swasta dan badan pengelola lebih dominan daripada peran masyarakat lokal. Masyarakat lokal hanya dilibatkan sebagai penyedia akomodasi dan atraksi saja (Dewi, M. H. U., Fandeli, C. & Baiquni, 2013).

Implementasi CBT juga memerlukan modal sosial yakni kepercayaan antara masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini dapat dilihat dari pengimplementasian CBT di Desa Isithumba, Afrika Selatan yang mana kurangnya komunikasi untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi, membuat proyek menjadi tidak menguntungkan karena masyarakat sendiri tidak mengetahui bagaimana *Durban Green Corridor* (organisasi non-profit untuk mengurangi kemiskinan perdesaan) beroperasi. Masyarakat yang diuntungkan dengan peluang wirausaha hanya mereka yang terlibat langsung (Mthethwa et al., 2020). Modal sosial yang kuat juga mendorong terwujudnya ketahanan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Musavengane & Kloppers, 2020).

Pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal sering diimplementasikan dalam konsep desa wisata. Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah desa wisata terbanyak di Indonesia dengan jumlah 339 desa wisata per April 2022 yang tersebar di 31 kabupaten/kota termasuk di Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto memiliki banyak potensi wisata dilihat dari letak geografisnya dan peninggalan sejarahnya mengingat Kabupaten Mojokerto merupakan pusat utama Kerajaan Majapahit di masa lampau.

Dilansir dari dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020, kawasan wisata di Kabupaten Mojokerto terbagi dalam tiga jenis yang tersebar dalam 18 kecamatan dan 304 desa/kelurahan. Kawasan tersebut terdiri dari: (1) wisata alam sebanyak 7 kawasan, (2) wisata budaya dan peninggalan sejarah sebanyak 23 kawasan, dan (3) wisata buatan sebanyak 3 kawasan. Dari total 304 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Mojokerto, penerapan konsep desa wisata hanya diimplementasikan di enam desa yang mana salah satunya di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas.

Desa Ketapanrame merupakan salah satu desa yang pengembangan pariwisatanya dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Wisata di Desa Wisata Ketapanrame terdiri dari Taman Ghanjaran, Wahana Taman Ghanjaran, Wisata Sawah Sumber Gempong, dan Air Terjun Dlundung. Kawasan wisata Taman Ghanjaran adalah pariwisata yang lahir dari pengalihfungsian tanah bengkok atau Tanah Kas Desa (TKD) dari sektor pertanian ke sektor wisata. Berdasar

hasil observasi awal peneliti, TKD dirasa kurang memiliki nilai jika dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Hal tersebut dilihat dari tidak tercapainya harapan balik modal atas pengerjaan lahan pertanian dan adanya keluhan dari petani yang mengelola TKD. Melihat permasalahan yang ada, pemerintah desa mengusulkan pengalihfungsian pemanfaatan sektor pertanian menjadi sektor pariwisata.

Wisata yang ada di Desa Wisata Ketapanrame berada di bawah pengawasan dan pengelolaan unit wisata BUMDes. Laporan keuangan pendapatan unit wisata BUMDes menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan atas pengalihfungsian lahan, dimana laba yang didapat unit wisata berada di angka Rp 106.866.700 pada tahun 2018 dan menjadi Rp 1.343.647.296 pada tahun 2020 (BUM Desa Ketapanrame, 2020). Lebih lanjut, banyaknya wisatawan membuat masyarakat antusias untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata desa.

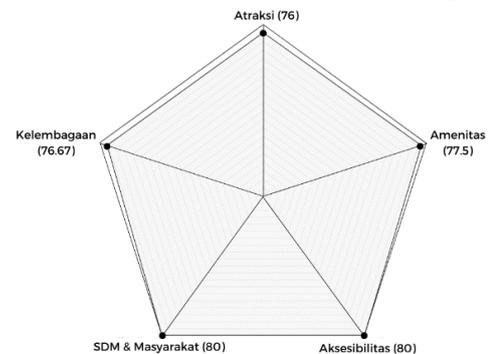
Pengimplementasian CBT membutuhkan landasan kuat dan tujuan yang jelas melalui perencanaan program yang matang. Demi mendukung hal tersebut, masyarakat harus memiliki kelompok sadar pariwisata dan lingkungan yang bekerja sebagai organisasi pengelola destinasi (Junaid et al., 2021). Konsep CBT di Desa Ketapanrame dijalankan oleh dua kelompok masyarakat yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Taman Ghanjaran yang mengelola Wahana Taman Ghanjaran dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Rakasiwi yang merupakan kepanjangan dari Penggerak Destinasi Wisata Desa yang membantu BUMDes dalam mengelola Wisata Sawah Sumber Gempong.

Berdasar hasil observasi awal peneliti, Wahana Taman Ghanjaran dan Wisata Sawah Sumber Gempong adalah wisata yang modalnya berasal dari masyarakat. Hal ini berangkat dari banyaknya masyarakat yang ingin membangun kios di kawasan wisata Taman Ghanjaran, namun desa mempertimbangkan apabila terlalu banyak kios maka tempat wisata berubah menjadi pasar. Oleh sebab itu dibuatlah program kerja pemberdayaan masyarakat melalui investasi warga supaya masyarakat desa tetap bisa ikut berpartisipasi dalam memiliki TKD meskipun bukan dengan cara berjualan.

Pemberdayaan investasi warga tertuang dalam strategi pengembangan desa yang diusung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) kepala desa. Pemerintah desa pada awalnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan wisata, baik di Wahana Taman Ghanjaran maupun Wisata Sawah Sumber Gempong. Kebijakan investasi wisata di Desa Wisata Ketapanrame hanya sebatas kepada masyarakat desa dan tidak

menerima investastor dari luar. Selain itu kebijakan desa memberlakukan karyawan atau sumber daya manusia yang bekerja hanya dari Desa Ketapanrame.

Analisis Jejaring Desa Wisata Kemenparekraf RI (2022) menyatakan Desa Wisata Ketapanrame masuk dalam kategori maju dengan bobot nilai 77.50 per April 2022. Berikut analisis Desa Wisata Ketapanrame:



Gambar 4. Analisis Desa Wisata Ketapanrame

Sumber: <https://jadesta.com/survei/17562> (2022)

Survei analisis penilaian tersebut dilihat dari segi: (1) Atraksi senilai 76; (2) Amenitas senilai 77.5; (3) Aksesibilitas senilai 80; (4) SDM dan Masyarakat senilai 80; dan (5) Kelembagaan senilai 76.67.

Meskipun termasuk ke dalam kategori maju, pengelolaan desa wisata dengan konsep CBT di Desa Ketapanrame masih memiliki berbagai kendala. Berdasar hasil observasi awal peneliti, ditemukan adanya keluhan pengunjung terhadap pelayanan parkir di Wisata Sawah Sumber Gempong. Keluhan yang ada mengindikasikan terkait masalah kurangnya area parkir dan pengaturan parkir yang masih belum optimal sehingga menimbulkan kemacetan. Hal ini disebabkan karena sempitnya akses menuju lokasi, kurangnya petugas parkir di akhir pekan, dan masih adanya petugas parkir yang kurang memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan di tempat wisata. Lebih lanjut, kebijakan pembatasan karyawan yang hanya berasal dari Desa Ketapanrame membuat kelompok masyarakat pengelola harus banyak belajar mengenai pengelolaan tempat wisata. Hal ini disebabkan karena latar belakang penduduk Desa Ketapanrame bukan berada di sektor wisata sehingga tidak ada yang tersertifikasi wisata.

Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa penerapan CBT memiliki tantangan dan kendala tersendiri, termasuk di Desa Wisata Ketapanrame. Hal tersebut membuat peneliti ingin memfokuskan penelitian ini pada bagaimana kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas dengan sumber daya manusia yang didominasi bukan dari bidang wisata. Peneliti menggunakan teori kegiatan partisipasi masyarakat menurut Theresia yang dikutip oleh Hajar et al., (2018)

yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksana kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

## **METODE**

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni dengan mendeskripsikan dan menganalisis peran partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan CBT. Peneliti juga menggunakan studi kasus dimana menurut Faisal adalah metode penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif (Kadji, 2016). Penelitian dilakukan di Desa Wisata Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, lebih tepatnya di pengelolaan wisata Wahana Taman Ghanjaran oleh KUB Taman Ghanjaran dan Wisata Sawah Sumber Gempong oleh Pokdarwis Rakasiwi.

Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori kegiatan partisipasi masyarakat menurut Theresia dalam Hajar et al., (2018) yang terbagi dalam:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan  
Hal ini diambil dari indikator partisipasi langsung masyarakat dalam forum pengambilan keputusan program pembangunan, seperti musyawarah kelompok pengelola wisata dan keterlibatan KUB Taman Ghanjaran serta Pokdarwis Rakasiwi dalam keputusan pengelolaan wisata.
2. Partisipasi dalam pelaksana kegiatan  
Hal ini dilihat dari pemerataan sumbangan masyarakat baik dari segi tenaga kerja, uang tunai atau beragam bentuk pengorbanan terlebih pengelolaan wisata di Desa Ketapanrame menerapkan kebijakan investasi dan keterlibatan SDM yang hanya berlaku untuk masyarakat lokal.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan  
Hal ini ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan pengelolaan wisata serta perilaku antar *stakeholders* yang terlibat dalam seluruh proses pengembangan desa wisata.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan  
Hal ini ditekankan pada kesadaran masyarakat desa terhadap pemanfaatan hasil pembangunan guna memperbaiki mutu hidup sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai.

Penentuan sumber data dan pemilihan responden dilakukan peneliti dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang ada dikategorikan sebagai sumber data primer dan sekunder

sebagai berikut: (1) sumber data primer, berupa wawancara bersama kepala desa, ketua BUMDes, ketua KUB Taman Ghanjaran, ketua Pokdarwis Rakasiwi, karyawan di Desa Wisata Ketapanrame, dan masyarakat Desa Ketapanrame yang menanamkan saham di pembangunan wisata desa serta dari hasil observasi dan dokumentasi; dan (2) sumber data sekunder, berupa laporan BUMDes Ketapanrame, media sosial milik Wahana Taman Ghanjaran dan Wisata Sawah Sumber Gempong, serta website Pemerintah Desa Ketapanrame.

Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode menurut (Siyoto & Sodik, 2015) yang terdiri dari: (1) reduksi data, yakni memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada yang penting, serta membuang informasi yang dirasa tidak diperlukan; (2) penyajian data, yakni mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai pokok permasalahan untuk melihat gambaran dari suatu data yang dikumpulkan; dan (3) kesimpulan atau verifikasi, yakni dengan membandingkan kesesuaian pernyataan subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Ketapanrame adalah salah satu desa di Kabupaten Mojokerto yang memiliki luas wilayah ±345,462 Ha dengan ketinggian wilayah 800-1.000 mdpl. Terletak di wilayah pegunungan membuat Desa Ketapanrame memaksimalkan potensi wisatanya hingga menjadi salah satu dari enam desa wisata di Kabupaten Mojokerto. Selain alasan topografi, adanya potensi pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) membuat desa berfokus ke sektor pariwisata.

Desa Ketapanrame terbagi dalam tiga dusun yang terdiri dari Dusun Ketapanrame, Dusun Sukorame, dan Dusun Slepri. Ketiga dusun memiliki TKD masing-masing, namun TKD yang dimanfaatkan menjadi sektor wisata untuk saat ini berada di Dusun Ketapanrame dengan kawasan wisata Taman Ghanjaran serta di Dusun Sukorame dengan Wisata Sawah Sumber Gempong. Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame dapat diuraikan sebagai berikut:

### **A. Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame**

Adanya Desa Wisata Ketapanrame bermula dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2013 – 2019 milik kepala desa yang rintisannya dilakukan pada tahun 2015 dan dieksekusi pada tahun 2018. Pada tahun 2018, pembangunan wisata difokuskan pada pembangunan Taman Ghanjaran di Dusun Ketapanrame. Pembangunan Taman Ghanjaran dieksekusi oleh BUMDes di bawah unit wisata. Hadirnya Taman Ghanjaran menarik banyak pengunjung sehingga masyarakat desa berlomba

menempati kios yang ada. Hal tersebut membuat pemerintah desa memikirkan strategi agar masyarakat tetap bisa berpartisipasi meskipun tidak dengan membuka kios di kawasan wisata. Inovasi desa untuk menjawab masalah tersebut adalah dengan melakukan kolaborasi bersama kelompok investasi warga.

Pada tahun 2020, program investasi digulirkan untuk pembangunan wahana permainan di lokasi Taman Ghanjaran yang diberi nama Wahana Taman Ghanjaran. Pihak desa dan BUMDes melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar mau menanamkan saham untuk pembangunan wahana tersebut. Setelah terkumpul para investor, dibentuklah kelompok mitra yang akan bertugas menjalankan manajemen dan operasional dari Wahana Taman Ghanjaran yang bernama Kelompok Usaha Bersama (KUB) Taman Ghanjaran.

Dana investasi yang terkumpul dan dikelola oleh KUB Taman Ghanjaran adalah senilai 3,8 miliar rupiah dari 442 kepala keluarga. Dana tersebut digunakan untuk membangun 12 wahana yaitu bianglala, bioskop VR, *bombom car*, *carousel*, *cinema 9D*, kereta jalan, odong-odong kereta, pontang-panting, rumah balon, sepeda udara, *swinger*, dan *tagada rider*. Selebihnya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana. *Grand opening* wahana dilakukan pada April 2020 dengan jam operasional wisata dari pukul 10.00 hingga 21.00 WIB setiap harinya. Berikut adalah gambar permainan yang ada di Wahana Taman Ghanjaran:



Gambar 5. Area Wahana Taman Ghanjaran

Sumber: Facebook Wahana Taman Ghanjaran (2021)

Pada tahun 2021, pembangunan wisata dikembangkan ke Dusun Sukorame dengan nama Wisata Sawah Sumber Gempong. Wisata ini dikelola oleh BUMDes di bawah unit wisata dan dibantu kelompok sadar wisata masyarakat yang diberi nama Pokdarwis Rakasiwi. Tugas Pokdarwis Rakasiwi adalah menjalankan operasional wisata dan bertanggungjawab atas ramai tidaknya tempat wisata. Sedangkan BUMDes bertugas membangun fasilitas umum dan wahana serta merencanakan, mengelola dan mengawasi jalannya kegiatan kepariwisataan mulai dari proses investasi hingga bagi hasilnya. BUMDes juga memiliki tanggung jawab mendampingi Pokdarwis Rakasiwi dalam menjalankan operasional wisata.

Wisata Sawah Sumber Gempong juga mengusung konsep investasi masyarakat dimana hanya masyarakat Dusun Sukorame yang boleh menanam saham. Dana investasi yang terkumpul sebesar 860 juta rupiah dari 98 kepala keluarga. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas umum berupa kolam pemandian, kolam terapi ikan, pondok sawah, spot selfie, toilet, kamar ganti, pujasera serta mushola. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk pembangunan wahana permainan yang meliputi ATV, bebek air, becak terbang, kereta sawah, kuda tunggang, sepeda layang serta penyewaan alat berkemah. Pembukaan secara resmi Wisata Sawah Sumber Gempong dilakukan pada bulan Desember 2021 dengan jam operasional pukul 07.30 sampai 17.00 WIB setiap harinya. Berikut adalah gambar pemandangan Wisata Sawah Sumber Gempong:



Gambar 6. Area Wisata Sawah Sumber Gempong

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2022)

Penerapan konsep CBT ditekankan pada ekonomi kerakyatan yang mana dalam kegiatannya dilakukan dan dinikmati masyarakat namun tetap memerlukan kerjasama serta dukungan dari pemerintah maupun swasta (Febriandhika & Kurniawan, 2019). Oleh sebab itu selain BUMDes dan kelompok masyarakat, pembangunan Desa Wisata Ketapanrame dibantu oleh pihak pemerintah kabupaten, swasta serta akademisi.

Pemerintah desa memiliki peran untuk memberikan penguatan dan masukan ke BUMDes serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan wisata desa. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki peran sebagai pendamping desa melalui dinas pemberdayaan maupun dinas kepariwisataan dan membantu desa dalam mempromosikan desa wisata. Keterlibatan pihak swasta, BUMN dan akademisi juga memiliki dampak kepada kemajuan desa wisata. Selain dari segi sumbangan dana untuk pembangunan fasilitas umum, pihak swasta, BUMN dan akademisi juga memberikan pendampingan sebagai desa binaan agar menjadi desa yang lebih mandiri dan berdaya.

Salah satu strategi promosi desa wisata adalah dengan *branding* desa. *Branding* merupakan hal penting bagi desa wisata karena dianggap sebagai identitas suatu tempat yang dapat menarik wisatawan dan menjadi alat promosi (Michandani & Arida, 2019). Desa Wisata Ketapanrame telah melakukan *branding* dengan *tagline*

“Sobo Ketapanrame” yang harapannya pengunjung bisa datang atau *sobo* lebih dari satu kali. Berikut logo dari *branding* Desa Wisata Ketapanrame:



Gambar 7. Logo Sobo Ketapanrame

Sumber: <http://www.soboketapanrame.com/> (2022)

Pelaksanaan *branding* desa wisata juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Aktivitas pemanfaatan teknologi digital telah menyumbang banyak perubahan di dunia, oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk mengikuti harapan masyarakat dalam kemajuan teknologi (Deby Febriyan Eprilianto et al., 2021). Hal ini juga berlaku dalam desa wisata, yang mana Desa Wisata Ketapanrame memiliki website desa wisata yang dikelola BUMDes dan dapat diakses melalui <https://www.soboketapanrame.com/>. Website yang ada dirasa masih perlu penambahan isi agar informasi wisata desa dapat terintegrasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua BUMDes Ketapanrame, Bapak Herwanto sebagai berikut:

“Isinya website sobo ketapanrame masih awal, masih perlu pengembangan dan pembenahan. Masih banyak koreksi yang perlu disesuaikan seperti narasi dan foto-fotonya. Pembuatannya belum satu tahun.”

Oleh sebab itu website Desa Wisata Ketapanrame harus terus dikembangkan karena dapat digunakan sebagai rujukan mendapat informasi yang lengkap mengenai Desa Wisata Ketapanrame.

## B. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam *Community Based Tourism*

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembangunan desa salah satunya dapat melalui proses pengambilan keputusan (Ikbal et al., 2021). Tujuan indikator pertama dalam penelitian ini adalah melihat peran aktif kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan wisata yang dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pelaksanaan CBT di Desa Wisata Ketapanrame yang menjadi fokus peneliti dilakukan oleh dua kelompok masyarakat yaitu KUB Taman Ghanjaran dan Pokdarwis Rakasiwi. KUB Taman Ghanjaran adalah mitra BUMDes yang menjalankan manajemen dan operasional Wahana Taman Ghanjaran. Kelompok

tersebut memiliki amanah mengelola modal investasi masyarakat desa yang menanamkan sahamnya untuk pembangunan wisata.

Melalui program investasi, masyarakat penanam saham telah menjadi anggota KUB Taman Ghanjaran. Anggota KUB turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penentuan pengurus KUB. Musyawarah diadakan untuk menentukan pengurus yang akan menjalankan proses manajemen kepariwisataan secara *end-to-end*, termasuk dalam mengelola dana investasi masyarakat. Proses pemilihan pengurus dilakukan secara aklamasi dengan persetujuan lisan anggota KUB. Lebih lanjut, hasil pemilihan pengurus menetapkan tujuh jabatan yang terdiri atas jabatan ketua, sekretaris I dan II, bendahara, serta pengawas I, II dan III.

Setelah terpilih, pengurus KUB Taman Ghanjaran memiliki kewenangan untuk memutuskan beberapa keputusan yang dijalankan sendiri maupun yang harus dilaporkan kepada pemerintah desa mengingat Wahana Taman Ghanjaran berdiri di aset TKD. Beberapa keputusan yang diambil pengurus KUB antara lain mekanisme pembagian dividen atas penanaman modal para investor, penentuan metode pembagian dividen, penentuan SDM yang terlibat dalam pengelolaan wahana, dan promosi serta pemasaran tempat wisata.

Sistem pembayaran saham dan pembagian dividen dilakukan secara *cashless* demi memudahkan transaksi dan pencatatannya. Keputusan persentase bagi hasil usaha juga diambil oleh pengurus KUB. Pembagian tersebut terbagi atas pembagian dividen investor, biaya operasional, pemeliharaan kawasan, zakat dan *sharing* BUMDes. Keputusan *sharing* BUMDes dilakukan KUB bersama dengan pihak pemerintah desa.

Penentuan karyawan di Wahana Taman Ghanjaran juga menjadi kewenangan pengurus KUB. Karyawan yang diambil hanya berasal dari masyarakat Desa Ketapanrame. Proses rekrutmen dilakukan dengan tes administrasi dan wawancara, serta dilengkapi *training* kecakapan dalam mengurus operasional wisata seperti menghadapi pengunjung dan mengecek mesin wahana. Lebih lanjut, penentuan ide promosi wisata melalui website dan media sosial juga dilakukan pengurus.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pengurus KUB telah berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Wahana Taman Ghanjaran. Pengurus juga memberikan kesempatan kepada anggota KUB untuk memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan melalui musyawarah bersama setiap enam bulan sekali. Masukan yang pernah diterima salah satunya mengenai jalan berlubang, selebihnya peran masyarakat dalam memberikan masukan cenderung pasif karena mengikuti keputusan pihak pengurus KUB.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KUB Taman Ghanjaran, Bapak Yaqin sebagai berikut:

“Masukan dari masyarakat ada namun tidak terlalu signifikan, seperti ada jalan berlubang. Sedikit sepele sebenarnya, selebihnya masyarakat pasrah ke pengurus.”

Berikut adalah dokumentasi musyawarah KUB Taman Ghanjaran:



Gambar 8. Musyawarah Anggota KUB  
Sumber: Dokumentasi KUB (2022)

Selain KUB Taman Ghanjaran, Pokdarwis Rakasiwi adalah kelompok masyarakat yang turut terlibat dalam pengelolaan wisata desa. Dibandingkan KUB, peran Pokdarwis Rakasiwi dalam mengambil keputusan kepariwisataan di Wisata Sawah Sumber Gempong lebih dibatasi mengingat pelaku manajemen dan pembangunan wisata dilakukan oleh BUMDes. Keterbatasan dalam pengambilan keputusan disebabkan Pokdarwis Rakasiwi hanyalah kelompok mitra *outsourcing* BUMDes yang masih baru dan perlu pemberdayaan. Hal ini disampaikan Ketua BUMDes Ketapanrame, Bapak Herwanto sebagai berikut:

“Kalau KUB eksekusinya secara keseluruhan sampai keuangan. Kalau Rakasiwi itu mitra bisnis, jadi ibarat yang punya perusahaan itu BUMDes tapi *outsourcing*-nya mereka. Pengelola manajemennya tetap BUMDes. Rakasiwi orientasinya pemberdayaan karena kita menghimpun masyarakat yang kurang memiliki kapabilitas di sektor wisata untuk belajar mengenai kepariwisataan.”

Peran Pokdarwis Rakasiwi dalam pengambilan keputusan lebih kepada menjalankan operasional wisata seperti menentukan SDM untuk kebutuhan area parkir dan loket. Pokdarwis Rakasiwi juga bertanggung jawab atas pemilihan ide konten dan media promosi, namun dalam pelaksanaannya masih perlu digencarkan lagi. Hal ini seperti yang disampaikan Ketua Pokdarwis Rakasiwi Bapak Karno sebagai berikut:

“Promosi kita ada instagram, tapi seperti monoton dan jalan di tempat. Seharusnya setiap ada event didokumentasikan dan diunggah, tapi dari teman teman mungkin masih kurang dan maju mundur, jadi lebih banyak difoto oleh BUMDes.”

Selebihnya keputusan seputar penanaman saham dan bagi hasilnya menjadi tanggung jawab BUMDes.

Musyawarah bersama penanam saham Wisata Sawah Sumber Gempong dilaksanakan selama tiga bulan sekali. Dalam musyawarah ini, masyarakat penanam saham diperkenankan memberikan masukan, namun karena masih dalam tahap pembangunan, masyarakat cenderung mengikuti kebijakan BUMDes dan pengelola wisata.

Berdasarkan pemaparan, dapat dilihat bahwa KUB Taman Ghanjaran berperan lebih banyak dalam pengambilan keputusan pengelolaan wisata daripada Pokdarwis Rakasiwi karena mengelola manajemen dan operasionalnya sendiri. Kedua kelompok pengelola juga memberikan kesempatan kepada masyarakat penanam saham untuk memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan, namun masyarakat cenderung mengikuti kebijakan pengelola. Meskipun demikian, adanya forum musyawarah anggota bersama masyarakat penanam saham tetap penting untuk diadakan secara rutin. Hal ini penting dilakukan mengingat hasil keputusan partisipasi masyarakat secara langsung dibutuhkan untuk menghindari adanya dominasi pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan yang mana hasilnya dirasa kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal (Hajar et al., 2018).

Pengelolaan tempat wisata desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, namun juga masyarakat desa (Bobsuni & Ma'ruf, 2021). Pada indikator kedua, peran partisipasi kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan kepariwisataan dilihat dari adanya sumbangan yang diberikan, baik sumber dana maupun sumber tenaga yang dijabarkan sebagai berikut:

## 2. Partisipasi dalam Pelaksana Kegiatan

Salah satu kunci keberhasilan program pembangunan wisata adalah keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan. Bentuk kontribusi masyarakat sebagai pelaksana pengembangan wisata dapat dilihat dari keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan dan sumbangsih materi, waktu serta pikiran (Ramdani & Karyani, 2020).

Masyarakat yang tergabung dalam KUB Taman Ghanjaran telah berpartisipasi dalam penanaman dana saham sebagai modal pembangunan Wahana Taman Ghanjaran. Saham yang ditanam memiliki ketentuan satu kepala keluarga dapat membeli maksimal 10 lembar saham yang memiliki nilai Rp 1.000.000 perlembar. Penanam saham wajib menyetorkan *fotocopy* KTP dan KK serta surat pernyataan bermaterai. Dari 1.866 KK, sebanyak 442 KK turut menyumbang dana senilai 3,8 miliar rupiah. Berikut tabel persebaran investor Wahana Taman Ghanjaran:

Tabel 1. Jumlah Investor Wahana Taman Ghanjaran

Nama Dusun	Jumlah Investor	Total KK Desa
Ketapanrame	288 KK	1.041 KK
Slepi	112 KK	625 KK
Sukorame	42 KK	200 KK
<b>Jumlah</b>	<b>442 KK</b>	<b>1.866 KK</b>

Sumber: KUB Taman Ghanjaran (2022)

Selain sumber dana, pengurus KUB juga turut berpartisipasi tenaga dalam mengelola uang anggota untuk pembangunan wahana, menentukan dan mengelola SDM wisata, mengelola media promosi wisata, serta melakukan bagi hasil usaha. Pengurus KUB terdiri atas delapan orang yang mana tujuh orang berasal dari hasil musyawarah anggota KUB dan satunya adalah pengurus tambahan. Delapan pengurus tersebut terdiri dari enam pengurus laki-laki dan dua pengurus perempuan. Latar belakang pendidikan pengurus didominasi oleh strata-1 sebanyak enam orang dan SMA/ sederajat sebanyak dua orang.

Dalam melakukan promosi wisata, pengurus turut memikirkan ide dan membuat konten promosi. Konten tersebut kemudian diunggah melalui website serta media sosial seperti facebook, instagram dan juga youtube. Berikut adalah tampilan media sosial instagram dari Wahana Taman Ghanjaran:



Gambar 9. Instagram Wahana Taman Ghanjaran

Sumber: Instagram @wahana\_taman\_ghanjaran (2022) Pada pengelolaannya, pengurus KUB sempat merasa pesimis akan tidak baliknya modal, namun hal tersebut tidak lagi menjadi kendala mengingat per tahun 2022, masyarakat yang menanamkan sahamnya sudah mendapat balik modal.

Terdapat pula 15 orang karyawan yang turut mengelola Wahana Taman Ghanjaran. Karyawan dibagi atas 12 karyawan operasional, dua teknisi dan satu *security*. Tugas karyawan operasional adalah menjalankan operasional wahana seperti penjaga wahana dan kasir, tugas teknisi adalah memeriksa wahana agar sesuai dengan prosedur, dan tugas *security* bertanggung jawab atas keamanan wisata. Karyawan KUB terdiri dari sembilan orang laki-laki dan enam orang perempuan. Lebih lanjut, 13 orang memiliki latar pendidikan SMA/ sederajat, satu orang D-3, dan satu orang S-1.

Kendala yang pernah dialami karyawan Wahana Taman Ghanjaran ketika menjalankan tugasnya adalah bagaimana menghadapi berbagai sifat orang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu karyawan KUB, Ibu Dian sebagai berikut:

“Kendala selama ini sih lebih ke bagaimana menghadapi berbagai macam sifat orang. Terkadang ada yang memiliki keinginan ini itu, namun kita di sini terus belajar.”

Pembangunan wisata dengan konsep investasi masyarakat juga dilakukan pada Wisata Sawah Sumber Gempong. Pembedanya investor bukan ditujukan kepada seluruh masyarakat desa melainkan hanya masyarakat Dusun Sukorame saja. Sebanyak 98 kepala keluarga menanamkan saham dengan ketentuan satu kepala keluarga maksimal bisa memiliki 10 lembar saham dengan nilai Rp 1.000.000 perlembarannya. Penanam saham wajib menyetorkan *fotocopy* KTP dan KK serta surat pernyataan bermaterai. Dana yang terkumpul dan dikelola BUMDes adalah sebesar 860 juta rupiah.

Selain dari sumber dana, ada Pokdarwis Rakasiwi dan masyarakat Dusun Sukorame yang memberikan sumbangsih tenaga kerja dalam pembangunan tempat wisata. Misalnya kerja bakti BUMDes bersama masyarakat Dusun Sukorame dalam membabat lahan yang akan digunakan sebagai tempat wisata. Para petani di sekitar tempat wisata juga diminta membuat pondok sawah yang dapat digunakan sebagai tempat bersantai para wisatawan. Berikut adalah dokumentasi dari kerja bakti pembangunan Wisata Sawah Sumber Gempong:



Gambar 10. Kerja Bakti Pembangunan Wisata Sawah Sumber Gempong

Sumber: BUMDes Ketapanrame (2020)

Pokdarwis Rakasiwi adalah kelompok yang membantu BUMDes dalam pengelolaan Wisata Sawah Sumber Gempong yang dibentuk atas kesepakatan pemerintah desa, BUMDes, BPD dan tokoh masyarakat Desa Ketapanrame. Pokdarwis Rakasiwi terdiri dari kurang lebih 30 anggota yang terbagi dalam pengurus berupa ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan lima seksi yakni: (1) seksi keamanan dan ketertiban, (2) seksi kebersihan dan keindahan, (3) seksi daya tarik wisata dan kenangan, (4) seksi hubungan masyarakat dan pengembangan SDM, dan (5) seksi pengembangan

usaha. Keanggotaannya didominasi oleh pemuda Dusun Sukorame dan masih belum terikat pasti dikarenakan ada anggota yang keluar karena mendapat pekerjaan lain atau pindah domisili. Hal ini disampaikan Ketua BUMDes, Bapak Herwanto sebagai berikut:

“Ada anggota yang lepas karena sudah mendapat pekerjaan lain. Ada juga yang menikah dengan orang luar desa sehingga ikut keluar. Rata-rata anggotanya muda dan memang belum ada daftar pastinya.”

Peran Pokdarwis Rakasiwi lebih kepada operasional wisata seperti menentukan kebutuhan SDM untuk parkir, penjaga tiket, petugas keamanan dan kebersihan hingga promosi. Meskipun telah dibentuk lima seksi untuk fokus pada masing-masing tanggung jawab, nyatanya dalam pengerjaan job deskripsinya masih dilakukan secara fleksibel jika di hari biasa. Hal ini seperti yang disampaikan Ketua Pokdarwis Rakasiwi, Bapak Karno sebagai berikut:

“Job desk kita sudah ada, tapi kalau terlalu terpaku nanti ada ketimpangan. Jadi kita istilahnya kekeluargaan utamanya dalam kebersihan, kecuali kalau *weekend* kita *standby* sesuai jobdesk masing-masing.”

Lebih lanjut, promosi wisata untuk saat ini dilakukan melalui media sosial facebook dan instagram.

Sumber daya manusia Pokdarwis Rakasiwi dalam menjalankan tugasnya masih perlu banyak belajar ilmu kepariwisataan seperti bagaimana cara melakukan promosi. Oleh sebab itu BUMDes wajib memberikan pendampingan dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku wisata. Hal ini selaras dengan konsep CBT yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan (Febriandhika & Kurniawan, 2019).

Berdasarkan pemaparan, dapat dilihat bahwa pembangunan kedua wisata sama-sama mendapatkan sumber dana dari masyarakat penanam saham serta sumber tenaga dari kelompok masyarakat pengelola. Sebagai pelaksana, sistem KUB Taman Ghanjaran lebih tertata dan kompleks karena mengurus manajemen dan operasionalnya sendiri, sedangkan Pokdarwis Rakasiwi masih perlu penataan dan pendampingan BUMDes meskipun hanya mengelola secara operasional.

Partisipasi merupakan wujud peran masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi demi tercapainya hasil pembangunan (Bobsuni & Ma'ruf, 2021). Dalam indikator yang ketiga, partisipasi dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam memantau proses dan perilaku antar kelompok kepentingan yang terlibat di dalam pembangunan sebagai berikut:

### 3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Era globalisasi telah menuntut keterbukaan informasi dalam pengembangan desa wisata. Keterbukaan informasi kepada masyarakat baik dalam catatan pemasukan dan pengeluaran sangat penting untuk dipublikasikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyelewengan yang dapat dilakukan oknum sehingga berindikasi pada penggelapan (Hendrayantoro, 2014).

Demi mendukung unsur keterbukaan untuk pemantauan masyarakat, pengurus KUB Taman Ghanjaran menyampaikan laporan di setiap penghujung tahun kepada anggota. Dalam musyawarah tersebut, anggota KUB juga dapat memberikan masukan untuk evaluasi pengelolaan wisata. Usulan yang pernah disampaikan dari pemantauan masyarakat adalah adanya keluhan genangan air akibat hujan. Hal tersebut membuat pengunjung tidak nyaman sehingga dilakukan pembangunan jalan *paving* dan atap wahana.

Pengurus KUB juga melaporkan jumlah perolehan penghasilan yang didapat dari penjualan tiket wahana setiap harinya. Pelaporan tersebut disampaikan dalam tiga grup *whatsapp* sesuai dusun masing-masing pada saat penghitungan pendapatan harian telah selesai. Tanggapan masyarakat penanam saham dalam pengelolaan uang yang mereka tanamkan menunjukkan respon positif. Hal ini disampaikan salah satu masyarakat penanam saham, Ibu Gita sebagai berikut:

“Wah kalau pengelolaannya sudah bagus sekali.

Setiap hari lewat *whatsapp group* kita dikasih laporan pendapatan yang didapat hari ini, jadi kita bisa langsung mantau.”

Berikut adalah dokumentasi pelaporan harian yang dilakukan pengurus KUB melalui *whatsapp group*:



Gambar 11. Pelaporan Harian Pendapatan KUB  
Sumber: Dokumentasi KUB (2022)

Pengurus KUB juga rutin melakukan rapat bulanan untuk evaluasi total. Sedangkan untuk rapat bersama karyawan dilakukan satu minggu sekali dengan pembahasan *briefing* dan pergantian *role* karyawan. Pergantian *role* yang dimaksud adalah satu karyawan tidak hanya memegang satu wahana, namun bergantian agar semua karyawan bisa mengoperasikan semua

wahana. Dalam rapat mingguan, karyawan dapat menyampaikan saran perihal operasional.

Berdasarkan hasil rapat evaluasi pengurus dan karyawan Wahana Taman Ghanjaran, kendala yang kerap dialami adalah musim penghujan yang membuat angka pengunjung menurun sehingga pendapatan ikut menurun. Selain itu, penurunan pendapatan juga terjadi akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengharuskan tempat wisata ditutup sementara selama empat bulan.

Selain di pengelolaan Wahana Taman Ghanjaran, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan di Wisata Sawah Sumber Gempong. Pokdarwis Rakasiwi sebagai mitra BUMDes dalam mengelola tempat wisata juga melakukan rapat evaluasi setiap minggu. Rapat rutin tersebut dilakukan di akhir pekan untuk membahas kendala yang dialami.

Tantangan yang dialami Pokdarwis Rakasiwi salah satunya adalah bagaimana menghadapi pengunjung, utamanya dalam layanan seperti parkir di saat tempat parkir masih kurang memadai karena kondisi tanah yang tinggi resapan air. Pengelola wisata sempat mendapat kritikan mengenai kualitas pelayanan parkir, namun hal tersebut segera dievaluasi. Lebih lanjut, SDM yang bukan berasal dari latar belakang wisata juga menjadi tantangan dan membuat pengelola harus banyak belajar. Kendala ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Pokdarwis Rakasiwi, Bapak Karno sebagai berikut:

“Kadang kita orang desa sedikit dipaksa masuk sistem. Anak-anak malu menyampaikan sesuatu dan pemberdayaan itu tantangannya besar. Jadi memang harus belajar, kita tanamkan jangan sampai ada miskomunikasi.”

Meskipun demikian, Pokdarwis Rakasiwi rutin mengadakan rapat evaluasi seperti dokumentasi berikut:



Gambar 12. Rapat Anggota Pokdarwis Rakasiwi  
Sumber: Dokumentasi Pokdarwis Rakasiwi (2022)

Pelaporan hasil pendapatan Wisata Sawah Sumber Gempong juga disampaikan setiap hari melalui grup *whatsapp*. Pembedanya adalah Pokdarwis Rakasiwi hanya menyerahkan hasil kalkulasi pendapatan kepada BUMDes karena BUMDes adalah pihak yang menyampaikan kepada masyarakat penanam saham.

Berikut adalah dokumentasi pelaporan harian pendapatan Wisata Sawah Sumber Gempong:

NO	WAHANA	SAAT	AMARAN (Rp.)	REVENUE	LABA TRAKSI
1	WISATA SAWAH	10	100.000	100.000	
2	WISATA	10	100.000	100.000	
3	WISATA	10	100.000	100.000	
4	WISATA	10	100.000	100.000	
5	WISATA	10	100.000	100.000	
6	WISATA	10	100.000	100.000	
TOTAL			600.000	600.000	

Gambar 13. Pelaporan Harian Pendapatan Wisata Sawah Sumber Gempong

Sumber: Dokumen BUMDes Ketapanrame (2022)

Musyawarah bersama masyarakat penanam saham dilakukan oleh BUMDes setiap tiga bulan sekali untuk membahas pelaporan hasil dan pengeluaran operasional. Masyarakat cenderung masih mengikuti kebijakan BUMDes untuk mengelola tempat wisata mengingat Wisata Sawah Sumber Gempong masih berjalan beberapa bulan dari pembukaannya di Desember 2021.

Pelaporan pendapatan harian kedua tempat wisata masih menggunakan grup *whatsapp*. Hal ini membuat masyarakat penanam saham hanya bisa mengetahui laporan melalui satu aplikasi yang datanya bisa hilang apabila pesannya dihapus dan tidak di-*backup*. Oleh sebab itu masih perlu adanya media pelaporan yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja oleh para penanam saham sehingga tidak terdapat kekhawatiran akan hilangnya data.

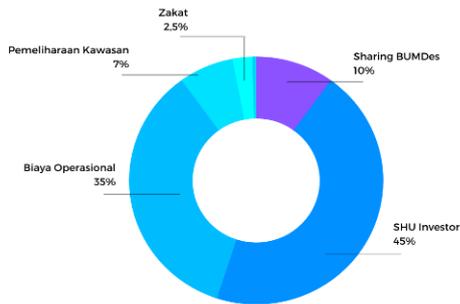
Partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam proses pembangunan mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan (Bhinadi, 2017). Pada indikator keempat, peran partisipasi dilihat dari penyadaran kelompok masyarakat akan manfaat hasil pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut:

#### 4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Sumbangan masyarakat baik dalam bentuk tenaga maupun dana harus sepadan dengan manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat desa yang terlibat. Hal ini mendorong terwujudnya tujuan dari pembangunan masyarakat yaitu untuk memperbaiki mutu hidup sehingga tercapainya pemerataan hasil pembangunan (Hajar et al., 2018).

Hasil pembangunan fisik dari penanaman saham untuk wisata Wahana Taman Ghanjaran adalah dua belas wahana permainan dan fasilitas umum wisata. Setelah Wahana Taman Ghanjaran dibuka dan dioperasikan, setiap bulannya masyarakat turut mendapatkan hasil berupa pembagian dividen. Pembagian dividen akan ditransfer ke rekening para penanam saham. Pihak KUB Taman Ghanjaran juga

wajib menyetorkan *sharing* hasil usahanya senilai 10% kepada BUMDes mengingat wahana berdiri di aset desa. Hal ini menyumbang peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Pembagian hasil yang didapat dari pengelolaan wahana dibagi 45% untuk penanam saham, 35% untuk biaya operasional seperti perawatan wahana dan gaji karyawan, 7% untuk pemeliharaan kawasan, 2,5% untuk zakat dan sisanya sebagai dana cadangan. Berikut adalah pembagian persentase hasil dari pendapatan Wahana Taman Ghanjaran setiap bulannya:



Gambar 14. Pembagian Hasil Pendapatan Wahana Taman Ghanjaran

Sumber: KUB Taman Ghanjaran

Selain dari sisi pembagian SHU, Wahana Taman Ghanjaran juga menyerap tenaga kerja karena persyaratan karyawan hanya boleh dari Desa Ketapanrame. Karyawan KUB Taman Ghanjaran merasakan manfaat mendapatkan pekerjaan yang dekat dengan rumah. Hal ini disampaikan oleh salah satu karyawan operasional Wahana Taman Ghanjaran, Ibu Dian sebagai berikut:

“Manfaat yang dirasakan tentunya kita dapat pekerjaan yang dekat dari rumah, jadi ini membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran desa karena karyawan yang diterima hanya dari warga desa. Lingkungan kerja di sini juga baik.”

Kendala yang dialami dalam pemanfaatan hasil pembangunan adalah pandemi yang mengharuskan penutupan tempat wisata akibat adanya PPKM. Mulai dari bulan Juni hingga September 2021, masyarakat tidak memperoleh bagi hasil karena wisata tidak beroperasi. Demi bertahan dari dampak pandemi, pengurus tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan namun diganti dengan sistem masuk bergilir dan penyesuaian gaji. Hal ini seperti yang disampaikan Ketua KUB Taman Ghanjaran, Bapak Yaqin sebagai berikut:

“PPKM kemarin kita tutup selama empat bulan, tidak ada pemasukan namun operasional perawatan wahana masih jalan. Anggota KUB tidak mendapat bagi hasil tapi teman teman karyawan tetap masuk. Paling seminggu dua

kali untuk kebersihan dan pengecekan wahana, karena kasihan juga.”

Selain Wahana Taman Ghanjaran, pembangunan Wisata Sawah Sumber Gempong juga memberikan manfaat kepada pihak desa serta masyarakat. Pembangunan tersebut menghasilkan wahana permainan dan fasilitas umum. Pembangunan Wisata Sawah Sumber Gempong telah meningkatkan PAD dan penghasilan Pokdarwis Rakasiwi. Selain itu, wisata ini juga menyerap pelaku usaha yang berjualan di kawasan wisata. Masyarakat penanam saham dan pemilik pondok sawah di sekitar tempat wisata juga turut mendapatkan bagi hasil dari pendapatan yang diterima. Berikut adalah dokumentasi bagi hasil pondok sawah di Wisata Sawah Sumber Gempong:



Gambar 15. Bagi Hasil Pondok Sawah

Sumber: Instagram @bumdesa\_ketapanrame (2022)

Pembagian hasil dari penerimaan pendapatan di Wisata Sawah Sumber Gempong adalah sebagai berikut: 10% pendapatan dari wahana, 15% pendapatan dari tiket masuk, dan 70% pendapatan parkir diberikan kepada Pokdarwis Rakasiwi sebagai pelaksana wisata; 10% pendapatan tiket masuk diberikan kepada masyarakat pemilik pondok di sawah sekitar tempat wisata; 65% pendapatan tiket masuk diberikan kepada masyarakat penanam saham, dan sisanya masuk ke pendapatan unit wisata BUMDes. Sistem pendapatan yang diperoleh anggota Rakasiwi didasarkan pada seberapa banyak presensi keikutsertaan mengelola wisata dalam satu bulan. Pembangunan wisata yang melibatkan Pokdarwis Rakasiwi juga menyerap tenaga kerja karena anggotanya berasal dari Dusun Sukorame.

Selain dari segi pendapatan, manfaat yang diperoleh Pokdarwis Rakasiwi adalah memperoleh sebuah keterampilan dalam mengelola wisata. Mereka belajar dari pengalaman dan pendampingan yang diberikan dan bisa membagi ilmu yang dimiliki ke masyarakat yang lain. Kelompok menyadari bahwa perannya dibutuhkan untuk membangun desa, hal ini seperti yang sampaikan ketua Pokdarwis Rakasiwi Bapak Karno sebagai berikut:

“Ada suatu kebanggaan bahwa desa saya punya seperti ini, walaupun secara materi masih empat bulan merasakan ganti jerih payah. Kalau dihitung finansial rasanya kurang masuk akal,

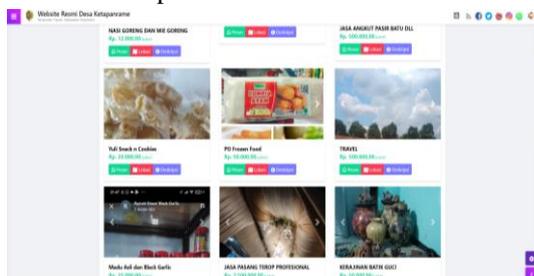
tapi kita bekerja sosial. Lama-kelamaan pasti mendapatkan hasil. Sekarang kita fokus pemberdayaan dulu.”

Ungkapan tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa peran masyarakat dibutuhkan dan mereka mendapat hasil pembangunan.

Demi unsur pemerataan pemanfaatan hasil, pemerintah desa juga mengambil kebijakan kepada para pemilik kios di kawasan wisata tidak diperkenankan menanam saham. Sayangnya masih ada masyarakat desa yang merasa belum menjadi bagian penerima manfaat hasil pembangunan desa wisata dikarenakan keterbatasan penyerapan, baik sebagai pelaku usaha maupun investor. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Ketapanrame, Bapak Zainul Arifin sebagai berikut:

“Antusias masyarakat desa itu tinggi. Sebenarnya masih ada warga yang menanyakan apakah sudah tidak bisa ikut memiliki Taman Ghanjaran maupun Sumber Gempong, jadi kita sebisa mungkin mencari solusi lain. Misal apabila mereka punya produk akan kita bantu pasarkan sebagai produk UMKM.”

Berikut adalah laman lapak desa di website Pemerintah Desa Ketapanrame sebagai salah satu upaya promosi produk UMKM masyarakat desa yang tidak terakomodasi di pelibatan desa wisata:



Gambar 16. Lapak Desa Ketapanrame

Sumber: <https://ketapanrame.desa.id/lapak> (2022)

Meskipun kelompok masyarakat pengelola wisata sama-sama merasakan manfaat dari adanya pembangunan desa, pemanfaatan masih bisa dinilai belum merata ke seluruh desa. Dari ketiga dusun, hanya Dusun Ketapanrame dan Dusun Sukorame yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sedangkan Dusun Slepi masih belum memiliki tempat wisata dan kelompok masyarakatnya sendiri. Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Desa Ketapanrame, Bapak Zainul Arifin sebagai berikut:

“Taman Ghanjaran lebih banyak menyerap warga Ketapanrame, sedangkan Sumber Gempong lebih ke Sukorame. Oleh sebab itu masyarakat Slepi menanyakan juga, tapi kami masih dalam wacana di RPJMDes untuk *rest area* supaya tidak cemburu masyarakatnya.”

Masyarakat desa yang terlibat dalam pengembangan desa wisata mendapatkan manfaat berupa lapangan pekerjaan dan dividen atas kepemilikan wisata, namun dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan untuk masyarakat Dusun Slepi. Masyarakat Dusun Slepi dirasa kurang mendapatkan manfaat dari pembangunan wisata karena letak geografis wisata yang hanya berada di Dusun Ketapanrame dan Dusun Sukorame. Idealnya pemanfaatan hasil pembangunan desa wisata haruslah dirasakan secara merata oleh masyarakat desa. Oleh sebab itu apabila pembangunan Wisata Sawah Sumber Gempong sudah stabil, perlu ditambahkan sektor wisata yang melibatkan masyarakat Dusun Slepi agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar dusun. Pemanfaat secara merata juga akan merangsang masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program pembangunan yang akan datang (Hajar et al., 2018).

## PENUTUP

### Simpulan

Pengembangan pelaksanaan CBT dalam pengelolaan Desa Wisata Ketapanrame dilaksanakan oleh dua kelompok masyarakat yaitu KUB Taman Ghanjaran yang mengelola Wahana Taman Ghanjaran dan Pokdarwis Rakasiwi yang mengelola Wisata Sawah Sumber Gempong. Dari keempat indikator dapat disimpulkan bahwa peran KUB Taman Ghanjaran lebih kompleks, utamanya dalam pengambilan keputusan dan pelaksana kegiatan karena mengurus manajemennya sendiri. Sedangkan peran Pokdarwis Rakasiwi lebih terbatas karena hanya membantu BUMDes dalam menjalankan operasional wisata. Pokdarwis Rakasiwi juga masih memerlukan pendampingan dan pemberdayaan dari BUMDes mengingat latar belakang anggotanya yang dinilai masih kurang memiliki kapabilitas di sektor pariwisata.

Dalam hal pemantauan dan evaluasi pembangunan, KUB Taman Ghanjaran dan Pokdarwis Rakasiwi sama-sama rutin melakukan rapat evaluasi dan melaporkan kepada penanam saham atas hasil yang diperoleh. Pembedanya Pokdarwis Rakasiwi terbatas menyampaikan ke BUMDes, kemudian diteruskan kepada penanam saham Wisata Sawah Sumber Gempong. Masyarakat yang merasakan manfaat hasil pembangunan adalah mereka yang terlibat dalam pengelolaan wisata. Manfaat yang diterima antara lain terbukanya lapangan pekerjaan dan penerimaan dividen dari saham yang ditanamkan. Sedangkan masyarakat yang tidak terlibat dan tidak merasa mendapatkan hasil pembangunan akan diberi akomodasi lain oleh

pemerintah desa seperti tempat pemasaran produk di lapak online website pemerintah desa.

#### Saran

Berdasarkan hasil penemuan di lapangan, peneliti memiliki beberapa saran untuk pengembangan CBT di Desa Wisata Ketapanrame sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan digital marketing mengenai media sosial kepada Pokdarwis Rakasiwi untuk mempromosikan Wisata Sawah Sumber Gempong.
2. Perlunya pembenahan sistem keanggotaan yang pasti untuk Pokdarwis Rakasiwi agar terbentuk *community engagement* yang baik.
3. Perlu adanya kegiatan pemberdayaan baik pelatihan maupun pendampingan kepada Pokdarwis Rakasiwi mengenai pemberian layanan bidang *hospitality* seperti bagaimana etika menerima tamu.
4. Setelah pembangunan Wisata Sawah Sumber Gempong sudah stabil, perlu dibangunnya wisata yang melibatkan partisipasi masyarakat Dusun Slepri agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar dusun.
5. Menggandeng kelompok masyarakat KUB Taman Ghanjaran dan Pokdarwis Rakasiwi untuk mengelola dan memanfaatkan website Desa Wisata Ketapanrame, salah satunya sebagai transparansi hasil pendapatan kepada para penanam saham.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2018. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan* (2nd ed.). Yogyakarta: Expert.

Amerta, I. M. S. 2017. Community Based Tourism Development. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 97–107. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v1n3.60>

Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Wisatawan Nusantara 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.

Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: CV Budi Utama.

Bobsuni, N., & Ma'ruf, M. F. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik). *Publika*, 215–226. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p215-226>

BUM Desa Ketapanrame. 2020. *Profil BUMDESA Ketapanrame*. Mojokerto: BUMDes Ketapanrame.

Deby Febriyan Eprilianto, Yuni Lestari, Suci Megawati, & Trena Aktiva Oktariyanda. 2021. Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Sebagai Upaya Adaptasi Desa dalam

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Era New Normal. *Communnity Development Journal*, 2(3), 767–776.

Dewi, M. H. U., Fandeli, C. & Baiquni, M. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>

Febriandhika, I., & Kurniawan, T. 2019. Membingkai Konsep Pariwisata yang Berkelanjutan melalui Community-Based Tourism: Sebuah Review Literatur. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 50. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p50-56>

Hajar, S., Tanjung, I. S., Tanjung, Y., & Zulfahmi. (2018). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLL.

Hendrayantoro, A. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya (Studi di Desa Wisata Brayut Pandowoharjo, Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman D.I.Y). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2, 49–57.

Idm.kemendes.go.id. 2021. *IDM: indeks desa membangun kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi*. <https://idm.kemendes.go.id/> diakses pada 27 Desember 2021.

Ikkal, M., Lukman, L., & Selfiani, S. 2021. Model Pengambilan Keputusan dalam Pembangunan Wisata Kuliner Pinggiran Sawah (Pirsa) Desa Bila Riase. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 25–30. <https://doi.org/10.35326/jsip.v2i1.1101>

Jejaring Desa Wisata Kemenparekraf RI. 2022. *Peta Persebaran Desa Wisata*. <https://jadesta.com/peta/> diakses pada 18 April 2022.

Junaid, I., Sigala, M., & Banchit, A. 2021. Implementing Community-based Tourism (CBT): Lessons Learnt and Implications by Involving Students in a CBT Project in Laelae Island, Indonesia. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education*, 29. <https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2020.100295>

Kadji, Y. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Sleman: CV Budi Utama.

Kurniawan, B. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. Jakarta.

Martini, N. K. A. 2020. Community Participation in Blangsinga tourism village development. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(3), 91–97. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n3.922>

- Michandani, E. S., & Arida, I. N. S. 2019. Perancangan Destination Branding Desa Wisata Kerta di Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(1), 111. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2019.v07.i01.p17>
- Mthethwa, N. B., Taylor, S., & Tefera, O. 2020. The Involvement, Perceptions and Challenges of The Community in Rural Tourism Development: A case of the Isithumba Village in eThekweni. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(2), 1–18.
- Musavengane, R., & Kloppers, R. 2020. Social capital: An Investment Towards Community Resilience in the Collaborative Natural Resources Management of Community-based Tourism Schemes. *Tourism Management Perspectives*, 34, 100654. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100654>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. 2019. *Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2018-2033*. Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Mojokerto.
- Pemerintah Desa Ketapanrame. 2022. *Lapak Desa Ketapanrame*. <https://ketapanrame.desa.id/lapak> diakses pada 14 April 2022.
- Prapita, E. D. 2018. *Pengembangan Desa Wisata*. CV Graha Printama Selaras.
- Prayitno, Gunawan, & Subagiyo, A. 2018. *Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*. Malang: UB Press.
- Purmada, D., Wilopo, W., & Hakim, L. 2016. Pengelolaan Desa Wisata dalam Perspektif Community Based Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 32(2), 15–22.
- Ramdani, Z., & Karyani, T. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Agrowisata dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus pada Agrowisata Kampung Flory, Sleman, Yogyakarta). *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2), 675. <https://doi.org/10.25157/ma.v6i2.3399>
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Siyoto, S., & Sodik, A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- The ASEAN Secretariat. 2016. *Asean Community Based Tourism Standard*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

